

Katalog : 4101002.3325

STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BATANG 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG**

**STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN BATANG
2016**



STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BATANG 2016

ISBN : 978-602-6375-42-1
Katalog : 4101002.3325
No. Publikasi : 33250.1719
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xxii + 50 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Sosial

Penyunting :

Seksi Statistik Sosial

Penulis :

Setiawan Budi Santoso, S.ST

Editor :

Ali Abrori, S.Si

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Dicetak Oleh :
CV. Biru Offset

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

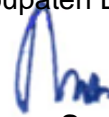
Buku publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2016, merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang. Penerbitan buku ini untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, perkembangannya antar waktu dan perbandingannya menurut daerah tempat tinggal.

Publikasi ini hanya menyajikan informasi yang dapat diukur dan tersedia datanya. Keterangan yang disajikan menyangkut berbagai bidang meliputi bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran/konsumsi penduduk.

Walaupun buku ini telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, kami menyadari masih banyak terdapat kelemahan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dan menuju perbaikan akan sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kritik, saran dan masukannya, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Batang, Oktober 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Batang



Fenny Susanto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ISTILAH TEKNIS.....	viii
BAB I KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	1
1.1 Kondisi Wilayah.....	1
1.2 Jumlah Penduduk.....	2
1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	3
1.4 Rasio Jenis Kelamin.....	4
1.5 Struktur Umur.....	6
1.6 Rasio Ketergantungan.....	7
1.7 Fertilitas, Umur Perkawinan Pertama, dan Keluarga Berencana.....	8
BAB II KESEHATAN.....	16
2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat.....	16
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan.....	18
2.3 Penggunaan Jaminan Kesehatan.....	21
2.4 Penolong Proses Kelahiran.....	22
BAB III PENDIDIKAN	24
3.1 Tingkat Pendidikan.....	25
3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	27
3.3 Angka Partisipasi Murni (APM).....	29
3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	30

BAB IV	KETENAGAKERJAAN.....	32
	4.1 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja.....	33
	4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	34
	4.3 Lapangan Pekerjaan Utama.....	36
BAB V	PERUMAHAN	37
	5.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal.....	37
	5.2 Penguasaan Tempat Tinggal.....	40
	5.3 Fasilitas Perumahan.....	41
	5.4 Penguasaan Alat Komunikasi.....	42
BAB VI	PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK.....	44
	6.1 Pengeluaran Rumah Tangga.....	44
	6.2 Konsumsi per Kapita Beberapa Komoditas Pokok.....	47
	6.3 Konsumsi Kalori dan Protein.....	48

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Persentase Penduduk menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Di Kab. Batang, 2015-2016.....	3
Tabel 1.2	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Batang, 2015-2016.....	4
Tabel 1.3	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kab. Batang, 2016.....	6
Tabel 1.4	Rasio Ketergantungan menurut Jenis Kelamin Di Kab. Batang, 2016.....	7
Tabel 1.5	Rasio Ketergantungan dan Proporsi Penduduk Usia Produktif Di Kab. Batang, 2016.....	8
Tabel 1.6	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Daerah Tempat Tinggal dan Umur Perkawinan Pertama Di Kab. Batang, 2016.....	9
Tabel 1.7	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kab. Batang, 2015-2016.....	10
Tabel 1.8	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Alat KB yang Digunakan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016.....	13
Tabel 1.9	Persentase Akseptor KB menurut Kontrasepsi yang Sedang Digunakan Di Kab. Batang, 2015-2016.....	14
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Terganggu menurut Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016.....	17
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Berobat Jalan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016.....	18
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Alasan Tidak Berobat Jalan, 2016.....	19
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat/Cara Berobat dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016.....	20
Tabel 2.5	Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016.....	21
Tabel 2.6	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016	22

Tabel 3.1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 25 Tahun ke Atas Di Kab. Batang, 2015-2016.....	25
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Di Kab. Batang, 2015-2016.....	26
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kab. Batang, 2015-2016.....	27
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Di Kab. Batang, 2015-2016.....	29
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kab. Batang, 2015-2016.....	30
Tabel 4.1	Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Di Kab. Batang, 2016.....	33
Tabel 5.1	Persentase Rata-rata Luas Lantai Di Kab. Batang, 2015-2016.....	38
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016.....	39
Tabel 5.3	Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Penguasaan Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016.....	40
Tabel 5.4	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016.....	41
Tabel 5.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler, Telepon Rumah (PSTN) dan Komputer dan Komputer Menurut Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016.....	43
Tabel 6.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (dalam Rupiah) menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016.....	45
Tabel 6.2	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (dalam Rupiah) menurut Kelompok Komoditas Di Kab. Batang, 2016.....	46
Tabel 6.3	Konsumsi Rata-rata per Kapita Seminggu menurut Kelompok Komoditas Di Kab. Batang 2016	48
Tabel 6.4	Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (Gram) per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016.....	49
Tabel 6.5	Rata-rata Konsumsi Protein (Gram) menurut Wilayah dan Daerah Tempat Tinggal 2016.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kab. Batang, 2016.....	5
Gambar 1.2 Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Di Kab. Batang, 2016.....	6
Gambar 1.3 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Partisipasi ber-KB Di Kab. Batang, 2016.....	11
Gambar 1.4 Persentase Penggunaan/Pemakaian Alat/Cara KB Di Kab. Batang, 2015-2016.....	12
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu Di Kab. Batang, 2016.....	34
Gambar 4.2 TPT dan TPAK Di Kab. Batang, 2016.....	35
Gambar 4.3 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama Selama Seminggu yang Lalu Di Kab. Batang 2016.....	36

DAFTAR ISTILAH TEKNIS

KEPENDUDUKAN

1. Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut.

2. Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.

3. Rasio Ketergantungan

Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun/anak-anak dan 65 tahun ke atas/lansia) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dikalikan 100.

4. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama

Rata-rata umur seorang wanita pada saat melaksanakan perkawinan yang pertama kali.

5. Partisipasi Keluarga Berencana

Proporsi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

6. Kontrasepsi Tetap (Kontap)

Alat/cara KB yang bersifat permanen/tetap, meliputi: MOW, MOP, AKDR/IUD dan Susuk/Implant.

KESEHATAN

1. Angka Kesakitan/Morbiditas

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga terganggu aktifitasnya. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

PENDIDIKAN

1. APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

2. APM (Angka Partisipasi Murni)

Proporsi jumlah anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan.

3. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

4. Rata-rata Lama Sekolah

Jumlah Tahun belajar penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angkanya maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

KETENAGAKERJAAN

1. Penduduk Usia Kerja

Jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas

2. Bekerja

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan/keuntungan selama paling sedikit 1 jam berturut-turut dalam satu minggu.

3. Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja

5. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Rasio jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan 100 persen

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase jumlah penduduk yang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja

PERUMAHAN

1. Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap.

2. Dinding Rumah

Sisi luar/batas dari suatu bangunan/penyekat dengan bangunan fisik lain.

3. Atap Rumah

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya.

4. Atap Layak

Jenis atap yang digunakan antara lain beton, genteng, sirap, seng dan asbes.

5. Fasilitas Air Minum

Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau Non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa.

6. Fasilitas Buang Air Besar

Kemudahan suatu rumah tangga dalam menggunakan jamban.

7. Tangki

Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk di sini daerah pemukiman yang mempunyai Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK

1. Konsumsi

Meliputi konsumsi makanan dan bukan makanan.

2. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita

Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

<https://batangkab.bps.go.id>

BAB I

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.1 Kondisi Wilayah

Kabupaten Batang mempunyai luas wilayah 788,64 km² (2,42% dari luas Jawa Tengah) merupakan salah satu daerah agraris di Provinsi Jawa Tengah. Dan juga merupakan salah satu daerah pantura yang cukup strategis. Jarak ibukota kabupaten (Batang) ke ibukota provinsi (Semarang) sejauh 93 km. Kabupaten Batang terdiri atas 15 kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Kabupaten Batang terletak diantara 006°51'46" dan 007°11'47" garis Lintang Selatan serta 109°40'19" dan 110°03'06" garis Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Timur	: Kabupaten Kendal
Sebelah Utara	: Laut Jawa

Kabupaten Batang terbagi menjadi 15 kecamatan. Luas wilayah Kab. Batang tercatat 78.864,16 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari 22.373,5 Ha (28,37 persen) lahan sawah dan 56.490,5 Ha (71,63 persen) lahan bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi 91,99 persen, kemudian selain itu adalah sawah tadah hujan yaitu sebesar 8,01 persen.

Sedangkan lahan bukan lahan sawah digunakan untuk tegal/huma sebesar 36,85 persen yang merupakan persentase penggunaan terbesar, kemudian lahan yang digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan negara, tambak/kolam dan padang rumput atau lahan bukan pertanian yaitu sebesar 28,03 persen.

Menurut data pengukuran tinggi curah hujan yang ada di setiap kecamatan, jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2016 di Kecamatan Blado dan paling sedikit di Kecamatan Gringsing. Sedangkan curah hujan yang paling tinggi di Kecamatan Bawang dan paling rendah di Kecamatan Batang.

1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan, dan papan. Permasalahan tersebut dapat mengganggu kesejahteraan

masyarakat yang tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya. Penyediaan pangan yang tidak tercukupi akan menimbulkan terjadinya kelaparan. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi akan menimbulkan permukiman kumuh, liar, dan tidak layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem informasi kependudukan yang handal, sehingga upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2016 yaitu sebesar 749.720 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 6.630 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai sebesar 743.090 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang periode tahun 2015-2016 yaitu sebesar 0,90. Bila dibandingkan dengan penduduk Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk Jawa Tengah periode tahun 2015-2016 sebesar 0,73 atau meningkat 245.000 jiwa, dimana jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2015 yaitu sebesar 33,77 juta jiwa dan setahun kemudian meningkat menjadi 34,02 juta jiwa.

Pada Tabel 1.1, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016, persentase penduduk perempuan mencapai 50,41 persen sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-laki sekitar 49,59 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, persentase penduduk perempuan mencapai 50,06 persen sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-laki sekitar 49,94 persen. Dari data di atas bahwa pola penduduk tahun 2015-2016 cenderung sama.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin
Di Kab. Batang, 2015-2016

Uraian	Persentase Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2015	371.071	372.019	743.090
Tahun 2016	374.375	375.345	749.720

Sumber : Proyeksi Penduduk SP2010

1.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk antar daerah yang kurang merata menimbulkan masalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Selain itu, persebaran penduduk yang tidak merata juga mengakibatkan perbedaan tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan luas wilayahnya yang dihitung dalam satuan jiwa per km persegi. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak sedangkan lahan dan luas wilayah tidaklah bertambah.

Tidak meratanya persebaran penduduk akan menyebabkan berbagai ketimpangan fasilitas dan sumber daya antar daerah tersebut. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan seperti meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak diimbangi dengan memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk permukiman, tidak tercukupinya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Bagi daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit akan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja

untuk mengolah lahan pertanian yang luas sehingga menyebabkan sumber-sumber daya alam/kekayaan yang ada tidak atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 743.090 jiwa meningkat menjadi 749.720 jiwa tahun 2016. Bila dilihat menurut jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki tahun 2015 yaitu sebesar 371.071 jiwa meningkat menjadi sebesar 374.375 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan tahun 2015 yaitu sebesar 372.019 jiwa meningkat menjadi 375.345 jiwa tahun 2016, demikian juga dengan kepadatan penduduk di Kab. Batang tercatat sebesar 942 jiwa setiap kilometer persegi tahun 2015 meningkat menjadi 951 jiwa setiap kilometer persegi tahun 2016.

Tabel 1.2
Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Jenis Kelamin,
Di Kabupaten Batang, 2015-2016

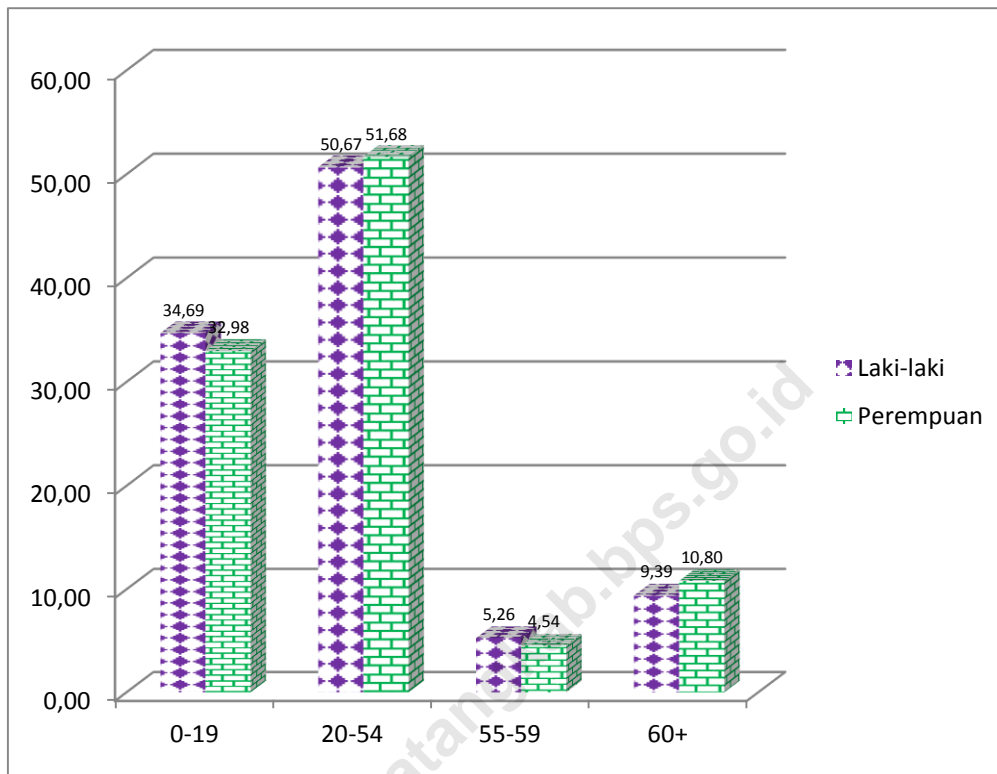
Uraian	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Luas Wilayah (Km2)	788,64	788,64
L	371.071	374.375
Penduduk		
P	372.019	375.345
T	743.090	749.720
Kepadatan	942	951

Sumber : Proyeksi Penduduk SP2010

1.4 Rasio Jenis Kelamin

Dilihat menurut kelompok umur, hanya pada kelompok umur 0-19 tahun yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan pada kelompok umur 20-54 tahun, 55-59 tahun dan 60 tahun ke atas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk perempuan. (Gambar 1.1)

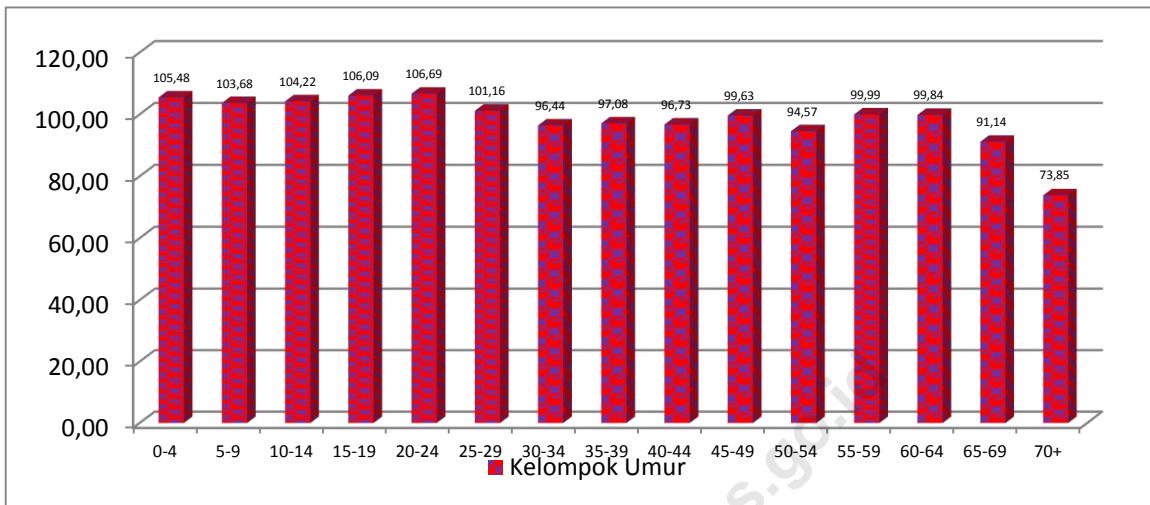
Gambar 1.1
Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kab. Batang, 2016



Sumber : Proyeksi Penduduk SP2010

Menurut hasil proyeksi SP2010, jumlah penduduk perempuan di Batang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yakni 374.375 jiwa berbanding 375.345 jiwa, dengan nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,74. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pada tahun 2016 di Batang terdapat 997 orang laki-laki pada setiap 1.000 orang perempuan. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat di Gambar 1.2, rasio jenis kelamin secara berangsur-angsur terus menurun sejalan dengan kenaikan umur, selanjutnya pada kelompok umur tua rasio jenis kelamin semakin jauh di bawah angka 100.

Gambar 1.2
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur
Di Kab. Batang, 2016



Sumber : Proyeksi Penduduk SP2010

1.5 Struktur Umur

Struktur umur penduduk Batang mengalami transisi menuju ke penduduk tua. Struktur tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) dan semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia dewasa (15-64 tahun) serta kelompok usia tua (65 tahun ke atas).

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk SP2010, pada Tabel 1.3 terlihat distribusi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa 24,57 persen penduduk Kabupaten Batang yang berusia muda sebesar 68,81 persen berusia produktif, dan hanya 6,62 persen yang berusia tua.

Tabel 1.3
Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kab. Batang, 2016

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	0-14	15-64	65+
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	25,13	68,95	5,92
Perempuan	24,00	68,68	7,32
Total	24,57	68,81	6,62

Sumber : Proyeksi Penduduk SP2010

1.6 Rasio Ketergantungan

Perubahan struktur penduduk menurut umur memengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun). Tinggi rendahnya rasio ketergantungan memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah. Angka rasio ketergantungan Batang tahun 2016 sebesar 45,32 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 orang penduduk usia tidak produktif.

Dari Tabel 1.4 menunjukkan bahwa beban tanggungan pada penduduk produktif laki-laki (36,45) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk produktif perempuan (34,95). Angka rasio ketergantungan penduduk muda (35,70) lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan penduduk tua (9,62). Hal ini menunjukkan masih perlunya program-program pembangunan yang diprioritaskan pada penduduk usia muda (0-14 tahun) terutama di bidang pendidikan.

Tabel 1.4
Rasio Ketergantungan menurut Jenis Kelamin
Di Kab. Batang, 2016

Jenis Kelamin	Rasio Ketergantungan		Total
	Muda	Tua	
(1)	(2)	(4)	(3)
Laki-laki	36,45	8,58	45,04
Perempuan	34,95	10,66	45,61
Total	35,70	9,62	45,32

Sumber : Proyeksi Penduduk SP2010

Proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Batang tahun 2016 yaitu sebesar 68,81 dan angka ketergantungan yaitu sebesar 45,32. Bila dibandingkan

dengan proporsi penduduk usia produktif Jawa Tengah, angka rasio ketergantungan kabupaten Batang masih dibawah angka Jawa Tengah yaitu sebesar 47,86. Kemudian proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Batang masih lebih baik bila dibandingkan dengan Jawa Tengah yaitu sebesar 67,63.

Tabel 1.5
Rasio Ketergantungan dan Proporsi Penduduk Usia Produktif menurut Wilayah Kab. Batang dan Jawa Tengah, 2016

Wilayah	Rasio Ketergantungan	Proporsi Penduduk Usia Produktif
(1)	(2)	(3)
Kab. Batang	45,32	68,81
Jawa Tengah	47,86	67,63

Sumber : Proyeksi Penduduk SP2010

1.7 Fertilitas, Umur Perkawinan Pertama, dan Keluarga Berencana

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Angka fertilitas yang tidak terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga beban negara akan semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Tingginya angka kelahiran tersebut sangat erat kaitannya dengan usia perkawinan pertama. Usia perkawinan pertama sebagai umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Tabel 1.6
Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Daerah Tempat Tinggal dan Umur Perkawinan Pertama Di Kab. Batang, 2016

Daerah Tempat Tinggal	Usia Perkawinan Pertama Wanita Pernah Kawin				
	< 17	17-18	19-24	25+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	8,27	14,11	44,98	32,64	100,00
Perdesaan	14,10	17,81	44,71	23,38	100,00
Total	11,76	16,32	44,82	27,11	100,00

Sumber : Susenas 2016

Tabel 1.6 menunjukkan, pada tahun 2016 sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada umur 19-24 tahun sebanyak 44,82 persen. Wanita yang melakukan perkawinan pertama yaitu pada umur 17-18 tahun sebesar 16,32 persen dan yang menikah pertama kali pada umur 25 tahun ke atas sebesar 27,11 persen. Sementara itu, masih ada wanita yang cenderung kawin pada umur kurang dari 17 tahun yaitu mencapai sebesar 11,76 persen.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, wanita cenderung kawin pada umur 19-24 tahun ke atas yaitu sebanyak 44,98 persen wanita di perkotaan dan 44,71 persen di perdesaan. Persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama pada umur kurang dari 17 tahun di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan

dengan yang tinggal di perkotaan yaitu 14,10 persen berbanding 8,27 persen. Demikian juga usia perkawinan pertama pada kelompok umur 17-18 tahun yaitu di daerah perdesaan sebesar 17,81 persen dan di perkotaan sebesar 14,11 persen. Wanita yang melakukan perkawinan pertama pada kelompok umur 25 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, di perkotaan yaitu mencapai sebesar 32,64 persen sedangkan di perdesaan sebesar 23,38 persen.

Tabel 1.7
Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kab. Batang, 2015-2016

Tahun	Kelompok Umur			
	< 17	17-18`	19-24	25+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	7,77	21,44	62,61	8,18
2016	11,76	16,32	44,82	27,11

Sumber : Susenas 2015, 2016

Berdasarkan Tabel 1.7, persentase wanita yang melangsungkan perkawinan pada umur lebih muda (<17 tahun) meningkat pada tahun 2016. Tahun 2015 persentase wanita yang umur perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun sebesar 7,77 persen, dan turun menjadi 11,76 persen tahun 2016. Persentase wanita yang menikah pada umur 17-18 tahun juga mengalami penurunan yaitu 21,44 persen tahun 2015, dan menjadi 16,32 persen tahun 2016.

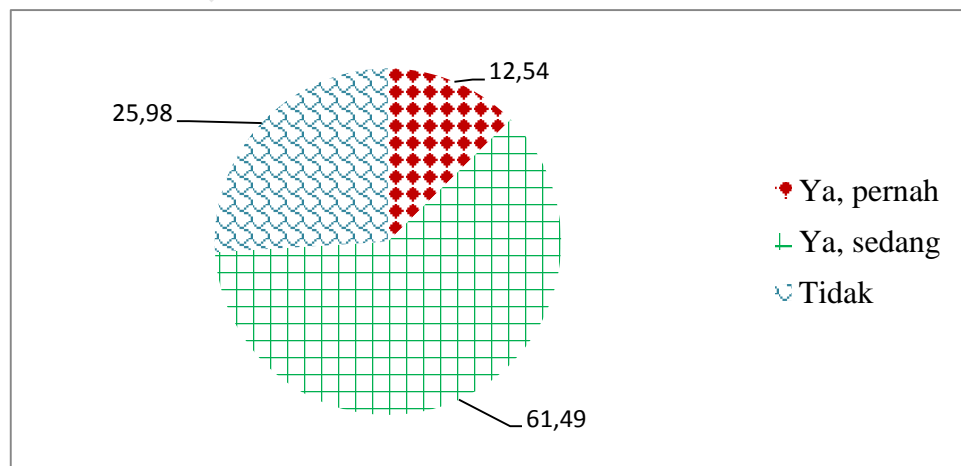
Menurunnya persentase wanita yang menikah di usia kurang dari 17 tahun dan 19-24 tahun menyebabkan persentase wanita yang menikah pada umur 25 tahun ke atas mengalami peningkatan di tahun 2016. Pesentase wanita yang menikah pada umur 25 tahun ke atas pada tahun 2015 yaitu 8,18 persen, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 27,11 persen. Pada tahun 2015 persentase wanita yang menikah pada umur

19-24 tahun sebesar 62,61 persen mengalami penurunan menjadi sebesar 44,82 persen tahun 2016.

Selain melalui penundaan umur perkawinan pertama, Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. KB berupaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yaitu membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jarak kehamilan dan usia ideal melahirkan anak, serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program KB dapat menjadi salah satu kunci sukses untuk menekan laju penduduk yang saat ini sangat sulit untuk dikendalikan. Disamping itu dalam rangka mencapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif membantu pemerintah dengan ber-KB melalui penggunaan alat kontrasepsi.

Gambar 1.3
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Partisipasi ber-KB di Kab. Batang, 2016



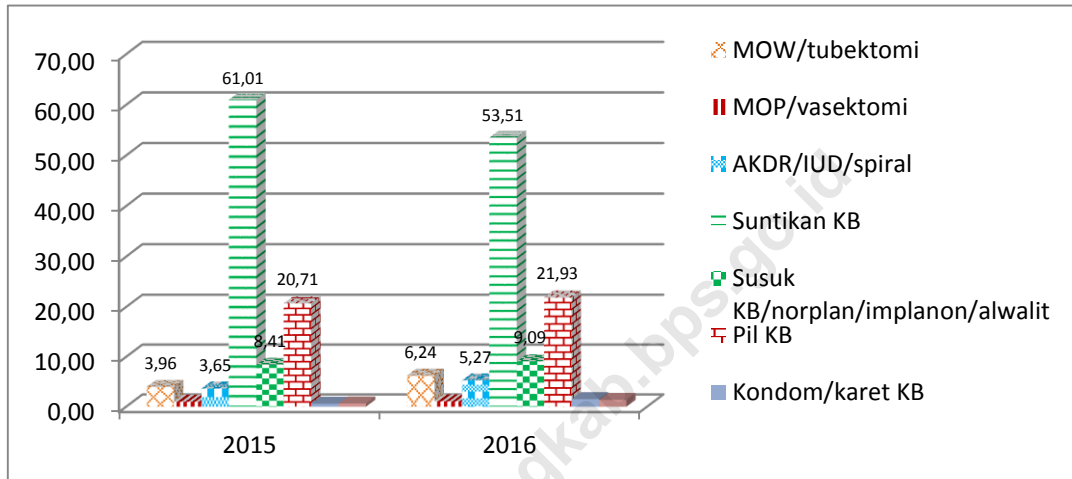
Sumber : Susenas 2016

Jika dilihat di Gambar 1.3, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 50 persen yaitu sebesar 61,49 persen. Sedangkan wanita umur 15-49 tahun yang

pernah menggunakan alat kontrasepsi dan sekarang sudah tidak menggunakan lagi sebanyak 12,54 persen dan sisanya sebanyak 25,98 persen yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

Gambar 1.4

Persentase Penggunaan/Pemakaian Alat/Cara KB Di Kab. Batang, 2015-2016



Sumber : Susenas 2015, dan 2016

Persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB masing masing sebesar 59,97 persen pada tahun 2015, dan 61,49 persen pada tahun 2016. Akseptor KB yang keluar (*drop out*) berfluktuasi yaitu 11,86 persen tahun 2015, dan meningkat menjadi 12,54 persen tahun 2016. Sementara itu, persentase wanita yang sama sekali tidak pernah menggunakan alat/cara KB dari tahun 2015-2016, yaitu 28,17 persen di tahun 2015 dan turun menjadi 25,98 persen di tahun 2016.

Tabel 1.8
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Alat KB yang Digunakan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016

Cara/Alat KB	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	7,26	5,66	6,24
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,00	1,69	1,08
IUD/AKDR/spiral	6,35	4,66	5,27
Suntikan	54,92	52,71	53,51
Susuk KB/implan	4,94	11,44	9,09
Pil	23,57	20,99	21,93
Kondom pria/karet KB	0,82	1,92	1,52
Metode menyusui alami	1,64	0,00	0,59
Pantang berkala/kalender	0,50	0,93	0,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016

Tabel 1.8 menyajikan dari 56,31 persen wanita umur 15-49 tahun pengguna alat kontrasepsi, cara yang paling banyak digunakan antara lain adalah Suntik KB (53,51 persen), Pil KB (21,93 persen), Susuk KB (9,09 persen), dan AKDR/IUD/Spiral (5,27 persen). Penggunaan alat kontrasepsi Suntik KB relatif praktis, mudah pemakaiannya (tidak membuat akseptor malu/risih pada saat pemasangan seperti misalnya IUD) dan efek sampingnya juga tidak terlalu besar, sehingga sebagian besar wanita kawin berumur 15-49 tahun cenderung lebih memilih jenis alat kontrasepsi ini.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun di perdesaan sebagian besar memilih menggunakan alat/cara KB suntik, masing-masing sebesar 54,92 persen di daerah perkotaan dan 52,71 persen di daerah perdesaan. Persentase wanita yang menggunakan alat/cara KB pil di perkotaan lebih tinggi yaitu ada sebanyak 23,57 persen dibanding di daerah perdesaan yang hanya mencapai 20,99 persen.

Alat/cara KB yang tidak asing digunakan di masyarakat meskipun persentasenya lebih rendah adalah Susuk KB, AKDR/IUD/spiral, MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, Kondom/karet KB dan cara KB Tradisional. Penggunaan Susuk KB di perdesaan sebanyak 11,44 persen lebih banyak dari daerah perkotaan yang hanya 4,94 persen. Sementara itu, pengguna AKDR/IUD/spiral lebih banyak di perkotaan sebesar 6,35 persen dibandingkan di perdesaan sebesar 4,66 persen.

Penduduk di daerah perkotaan yang memutuskan untuk menggunakan MOW/tubektomi sebanyak 7,26 persen lebih banyak dibanding di perdesaan sebesar 5,66 persen. Sekitar 0,82 persen (perkotaan) dan di perdesaan 1,92 persen yang menggunakan Kondom/karet KB. Pasangan usia subur yang memilih cara KB Tradisional untuk menunda kehamilan persentasenya relatif rendah sekitar 2,14 persen di daerah perkotaan dan 0,93 persen di daerah perdesaan. Penggunaan alat/cara kontrasepsi berupa intravag/kondom wanita paling jarang digunakan baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Tabel 1.9
Persentase Akseptor KB menurut Kontrasepsi yang Sedang Digunakan
Di Kab. Batang, 2015-2016

Alat/Cara KB	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	3,97	6,24
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	1,00	1,08
IUD/AKDR/spiral	3,65	5,27
Suntikan	61,01	53,51
Susuk KB/implan	8,41	9,09
Pil	20,71	21,93
Kondom pria/karet KB	0,60	1,52
Cara tradisional	0,66	1,36

Sumber : Susenas, 2015 dan 2016

Tabel 1.9 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntik dan pil yang paling banyak diminati. Penggunaan suntik dengan trend

menurun mencapai 61,01 persen di tahun 2015 dan menjadi 53,51 persen di tahun 2016. Sementara itu, penggunaan pil yaitu sebesar 20,71 persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 21,93 persen di tahun 2016. Berkurangnya akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi berupa MOW dan Suntik KB diikuti oleh semakin meningkatnya akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi Susuk KB, PIL KB, Kondom pria/karet KB, AKDR/IUD/spiral dan cara tradisional.

<https://batangkab.bps.go.id>

BAB II

KESEHATAN

Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu, tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka proses dan dinamika pembangunan ekonomi di wilayah tersebut akan semakin baik. Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pelayanan publik di bidang kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Peningkatan kualitas hidup penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang dipakai untuk melihat derajat kesehatan penduduk salah satunya adalah angka kesakitan. Program pembangunan di bidang kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk. Meningkatnya derajat kesehatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk dapat terlihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan Angka Morbiditas (kesakitan). Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan

terganggunya aktifitas sehari-hari yang terjadi baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya selama satu bulan sebelum pencacahan. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Terganggu menurut Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016

Rincian	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keluhan Kesehatan (%)	32,87	31,23	30,42	25,47	31,41	27,87
Angka Kesakitan (%)	13,96	17,03	15,68	13,06	14,98	14,71
Rata-rata Lamanya Terganggu (hari)	5,43	2,82	6,28	2,95	5,96	2,89

Sumber : Susenas 2015 dan 2016

Pada Tabel 2.1, keluhan kesehatan penduduk Batang tahun 2016 sebesar 27,87 persen. Persentase ini turun jika dibandingkan dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tahun 2015 sebesar 31,41 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 31,23 persen dan 25,47 persen.

Angka kesakitan penduduk perdesaan (13,06 persen) lebih rendah dibandingkan angka kesakitan penduduk di perkotaan (17,03 persen). Angka kesakitan penduduk Kab. Batang pada tahun 2016 mencapai 14,71 persen.

Lama terganggu merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat. Menurunnya angka kesakitan tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang lebih baik, jika

tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama terganggu. Semakin lama (hari) terganggu, maka keluhan kesehatan yang dialami masyarakat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

Hasil Susenas tahun 2015 dan 2016 rata-rata lama terganggu berada pada kisaran 3-6 hari. Selama tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa rata-rata lama terganggu di perdesaan lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama terganggu di perkotaan. Rata-rata lama terganggu di perkotaan pada tahun 2015 mencapai sebesar 5,43 hari, turun menjadi 2,82 hari pada tahun 2016. Penurunan rata-rata lama terganggu di daerah perkotaan pada periode yang sama juga terjadi di daerah perdesaan. Lamanya sakit di daerah perdesaan penurunan dari 6,28 hari menjadi 2,95 hari selama tahun 2015-2016.

2.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.2
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Berobat Jalan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016

Rincian	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berobat Jalan	58,21	61,66	56,00	54,08	56,94	57,62
Tidak Berobat Jalan	41,79	38,34	44,00	45,92	43,06	42,38

Sumber : Susenas 2015 dan 2016

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Pada Tabel 2.2 menyajikan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan. Penduduk yang berobat jalan sebanyak 57,62 persen.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk di perkotaan yang berobat jalan lebih tinggi dibandingkan penduduk di perdesaan yang berobat jalan, yaitu masing-masing sebesar 61,66 di daerah perkotaan dan 54,08 persen di daerah perdesaan.

Jika dilihat dari persentase penduduk yang berobat jalan, masih ada 42,38 persen penduduk yang tidak berobat jalan. Cara pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat selain berobat jalan adalah mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati. Untuk itu perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak melakukan berobat jalan. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Alasan Tidak Berobat Jalan Di Kab Batang, 2016

Alasan utama tidak berobat jalan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya biaya berobat	4,73	0,76	2,44
Tidak ada biaya transport	0,67	1,32	1,05
Mengobati sendiri	39,96	41,86	41,06
Merasa tidak perlu	54,63	55,37	55,06
Lainnya	0,00	0,69	0,39
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016

Berdasarkan Tabel 2.3, penduduk yang tidak berobat jalan memilih untuk mengobati sendiri sebanyak 41,06 persen. Selain itu, penduduk yang merasa tidak perlu berobat jalan sebesar 55,06 persen, diikuti alasan tidak ada biaya berobat sebesar 2,44 persen. Walaupun persentase rendah, masih ada penduduk yang tidak berobat jalan

dengan alasan tidak ada yang mendampingi, tidak ada biaya transport, waktu tunggu pelayanan lama dan tidak ada sarana transportasi.

Tabel 2.4
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
menurut Tempat/Cara Berobat dan Daerah Tempat Tinggal
Di Kab. Batang, 2016

Tempat/Cara Berobat	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	6,82	5,32	6,07
RS Swasta	2,74	4,66	3,70
Praktek Dokter/Bidan	57,11	55,31	56,21
Klinik/Praktek Dokter bersama	5,78	5,70	5,74
Puskesmas/Pustu	27,26	30,92	29,09
UKBM	0,31	0,00	0,16
Praktek pengobatan tradisional/alternatif	2,30	1,09	1,69
Lainnya	0,53	4,89	2,71

Sumber : Susenas 2016

Dari Tabel 2.4 diketahui bahwa persentase penduduk yang berobat jalan karena mengalami keluhan kesehatan menurut tempat/cara berobat dan daerah tempat tinggal. Pada umumnya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berobat jalan ke Praktek Dokter/Bidan sebesar 56,21 persen. Sebanyak 29,09 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengobati penyakitnya dengan mengunjungi ke Puskesmas/Pustu.

Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat atau cara berobat tahun 2016 yaitu Praktek Dokter/Poliklinik/Bidan yaitu 5,74 persen di perkotaan dan 5,70 persen di perdesaan. Penduduk yang berobat jalan ke Rumah Sakit Pemerintah yaitu 6,82 persen di perkotaan dan 5,32 persen di perdesaan. Begitu juga penduduk yang berobat jalan ke Rumah Sakit Swasta sebesar 2,74 persen di perkotaan dan 4,66 persen di perdesaan. Hal ini disebabkan makin beragamnya jaminan kesehatan yang diberikan

pemerintah kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik.

2.3. Penggunaan Jaminan Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah berupaya menyediakan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal Di Kabupaten Batang, 2016

Jaminan Kesehatan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
BPJS Kesehatan	17,33	16,22	16,68
BPJS Ketenagakerjaan	3,53	0,19	1,58
Jaminan kesehatan dari Askes/Asabri/Jamsostek	3,46	2,27	2,77
Jaminan Kesehatan dari Jamkesmas/PBI	22,83	35,66	30,32
Jaminan Kesehatan dari Jamkesda	3,91	2,45	3,06
Jaminan Kesehatan dari Asuransi Swasta	0,55	1,26	0,97
Jaminan Kesehatan dari Perusahaan/Kantor	0,09	0,30	0,21
Tidak memiliki Jaminan Kesehatan	48,28	43,66	45,58

Sumber : Susenas 2016

Tabel 2.5 memperlihatkan bahwa jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah Jamkesmas/PBI (30,32 persen), BPJS Kesehatan (16,68 persen), Jamkesda (3,06 persen), Askes/Asabri/Jamsostek (2,77 persen), dan BPJS

Ketenagakerjaan (1,58 persen). Masih ada 45,58 persen masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jaminan kesehatan paling banyak dimiliki masyarakat perkotaan dibanding masyarakat di perdesaan. Dari penduduk yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, bahwa hampir separuh masyarakat di perkotaan tidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 48,28 persen, lebih banyak dari masyarakat di perdesaan sebanyak 43,66 persen. Hal ini dapat disebabkan kurangnya informasi tentang kepemilikan jaminan kesehatan.

2.4. Penolong Proses Kelahiran

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat tetapi juga dilihat dari indikator penolong persalinan. Dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga medis dapat memengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan.

Tabel 2.6
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir dan Daerah Tempat Tinggal Di Kabupaten Batang, 2016

Penolong proses kelahiran	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter (Kandungan, Umum)	32,30	20,76	27,10
Bidan	67,95	71,90	69,73
Tenaga Kesehatan Lainnya	0,38	1,69	0,97
Dukun Beranak/Paraji	0,00	4,88	2,20
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016

Tabel 2.6 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut penolong kelahiran anak terakhir di Batang sebagian besar adalah oleh Bidan (69,73 persen) dan Dokter (dokter kandungan dan dokter umum) 27,10 persen. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, penolong kelahiran yang terbanyak baik di daerah perkotaan maupun perdesaan sama yaitu oleh Bidan, masing-masing sebesar 67,95 persen dan 71,90 persen. Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta biaya yang terjangkau, menjadikan sebagian besar masyarakat cenderung lebih untuk mengunjungi bidan, baik bidan praktek maupun bidan desa.

Masih ada 4,88 persen di perdesaan yang menggunakan tenaga non medis yaitu Dukun bersalin. Ini berarti bahwa tidak sedikit masyarakat Batang yang masih mempercayakan penolong proses kelahiran kepada Dukun bersalin. Hal ini dimungkinkan masalah biaya dan jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang cukup jauh.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Salah satu tujuan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

BAB III

PENDIDIKAN

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsanya melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah satu investasi bagi pembangunan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas sehingga dapat mendukung kemajuan bangsa. Peranan pendidikan yang sangat penting tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan program pembangunan sarana prasarana sekolah, ditunjang dengan program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Pemenuhan atas hak pendidikan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam pembangunan, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang masih mendapatkan perhatian paling besar. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya masalah mendasar dalam bidang pendidikan. Angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan antar kelompok penduduk dan antara daerah, serta kualitas pendidikan yang belum bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang semakin kompetitif, merupakan beberapa permasalahan mendasar pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia dapat juga diukur dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk

umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah dapat mengindikasikan sampai sejauh mana tingkat pendidikan yang dijalani oleh seseorang. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Rata-rata lama sekolah penduduk di Batang berdasarkan Tabel 3.1 sekitar 6,42 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk dewasa (25 tahun ke atas) baru dapat menyelesaikan sampai kelas 6 SD. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 di Prop. Jawa Tengah yaitu sebesar 7,15 tahun. Dari data di atas rata-rata lama sekolah Kab. Batang masih lebih rendah dari rata-rata lama sekolah Prop. Jawa Tengah dimana rata-rata lamanya sampai kelas VII (kelas 1 SMP), sedangkan Kab. Batang hanya sampai kelas 6 SD.

Tabel 3.1

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 25 Tahun ke Atas Di Kabupaten Batang dan Jawa Tengah, 2015-2016

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Kab. Batang	6,41	6,42
Prop. Jateng	7,03	7,15

Sumber : Susenas 2015, 2016

3.1 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang mencerminkan semakin luas pengetahuan dan keahlian/keterampilan yang dimilikinya. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan dapat digunakan

untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Di Kab.Batang, 2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah	22,75	28,28	25,96
Tamat SD	41,91	45,03	43,72
Tamat SMP	13,26	14,64	14,06
Tamat SMA	14,75	9,27	11,57
Tamat Diploma/Sarjana	5,56	4,06	4,69
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016

Berdasarkan Tabel 3.2, pada tahun 2016, penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak/belum menamatkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar masih relatif tinggi yaitu 25,96 persen. Penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar sebesar 43,72 persen. Masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu hanya 4,69 persen.

Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk di perkotaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik daripada penduduk di perdesaan. Persentase penduduk perkotaan dengan tingkat pendidikan SMP/MTs ke atas pada setiap jenjang pendidikan selalu lebih tinggi dibanding di perdesaan. Namun, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (SD, belum tamat SD, dan tidak/belum pernah sekolah) lebih tinggi di perdesaan dibanding di perkotaan.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dari perempuan. Persentase penduduk perempuan yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD/MI lebih banyak dibandingkan persentase penduduk laki-laki yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD/MI. Tingkat pendidikan penduduk laki-laki yang

duduk di jenjang pendidikan SD/MI hingga SM/MA lebih tinggi dibanding tingkat pendidikan penduduk perempuan.

Persentase penduduk laki-laki yang tamat SD/MI sebesar 45,93 persen, sedangkan persentase penduduk perempuan 41,44 persen. Penduduk laki-laki yang tamat SMP/MTs sebesar 14,51 persen, sedangkan penduduk perempuan hanya 13,60 persen. Untuk jenjang SM/MA, sebesar 13,04 persen penduduk laki-laki telah menamatkan pendidikan SM/MA, sementara penduduk perempuan hanya 10,05 persen. Sementara itu, persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan hingga tingkat Diploma/Universitas sebesar 3,97 persen lebih rendah dibandingkan persentase penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan Diploma/Universitas yaitu sebesar 5,43 persen.

3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Salah satu indikator penting yang dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kab. Batang, 2015-2016

Kelompok Umur	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	99,72	100,00	99,87	100,00	99,44	99,73
13-15	91,46	94,14	92,63	93,38	98,27	95,63
16-18	72,29	59,99	66,84	58,80	72,65	64,48
19-24	11,21	12,96	12,10	21,91	22,10	22,01

Sumber : Susenas 2015, 2016

Di Batang, pada tingkat sekolah dasar terdapat 99,73 persen penduduk telah bersekolah pada tahun 2016. Ini berarti bahwa ada sebanyak 0,17 persen anak berumur 7-12 tahun yang sedang tidak sekolah di Sekolah Dasar. Dua kemungkinan yang terjadi, yaitu sedang bersekolah di jenjang yang lebih tinggi atau sudah tidak bersekolah lagi. Penduduk umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 95,63 persen dan penduduk yang berumur 16-18 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 64,48 persen.

Selama kurun waktu 2015-2016, jumlah penduduk di semua kelompok umur yang masih sekolah mengalami peningkatan. Jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang sedang bersekolah di tahun 2015 masing-masing sebesar 99,87 persen dan 66,84 persen turun masing-masing menjadi 99,73 persen dan 64,48 persen di tahun 2016. Demikian juga dengan jumlah penduduk umur 19-24 tahun yang masih sekolah juga mengalami peningkatan yaitu masing-masing dari 12,10 persen menjadi 22,01 persen. Sedangkan jumlah penduduk umur 13-15 tahun cenderung mengalami penurunan yaitu masing-masing dari 66,84 persen menjadi 64,48 persen.

Pola yang digambarkan oleh partisipasi sekolah untuk penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan relatif sama di setiap kelompok umur sekolah. Semakin tinggi kelompok umur sekolah maka partisipasinya semakin kecil. Dari gambaran partisipasi tersebut terlihat bahwa kesempatan antara penduduk perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan adalah sama.

Pada tahun 2016 di kelompok umur 7-12 tahun partisipasi sekolah laki-laki 100 persen dan partisipasi sekolah perempuan 97,83 persen. Partisipasi sekolah untuk laki-laki di kelompok umur 13-15 tahun sebesar 93,38 persen, sedangkan partisipasi sekolah untuk perempuan sebesar 98,27 persen. Sementara itu, di kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolah laki-laki sebesar 58,80 persen dan partisipasi sekolah perempuan sebesar 72,65 persen. Untuk kelompok umur 19-24 tahun, partisipasi sekolah

laki-laki sebanyak 21,91 persen dan partisipasi sekolah perempuan sebanyak 22,10 persen.

3.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Semakin tinggi APM berarti banyak anak pada kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 3.4
Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
Di Kab. Batang, 2015-2016

Jenjang Pendidikan	2015			2016		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	99,72	88,29	93,53	100,00	97,83	98,93
SMP	71,82	84,99	77,56	76,55	80,86	78,52
SMA	66,16	54,74	61,11	52,10	52,69	52,34
Perguruan Tinggi	5,07	8,99	7,06	9,33	12,96	11,16

Sumber : Susenas 2015, 2016

Selama kurun waktu 2015-2016 APM di Batang menunjukkan peningkatan pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dan SM/MA. Pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebesar 98,83 persen penduduk berumur 7-12 tahun sedang bersekolah di Sekolah Dasar. Sementara itu, penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs sebesar 78,52 persen, penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah di SM/MA sebesar 52,34 persen dan penduduk umur 19-24 tahun yang sekolah di Akademi/Universitas sebesar 11,16 persen.

Angka partisipasi sekolah untuk SD/MI turun dari 93,53 persen meningkat menjadi 98,93 persen. Sedangkan angka partisipasi sekolah untuk SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari 77,56 persen menjadi 78,52 persen. Pada tingkat SM/MA, angka partisipasi sekolah meningkat dari 61,11 persen turun menjadi 52,34 persen. Angka partisipasi sekolah pada tingkat Perguruan Tinggi juga mengalami peningkatan dari 7,06 persen menjadi 11,16 persen.

3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua dibanding umur standar di jenjang pendidikan tertentu. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

Tabel 3.5
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Batang, 2015-2016

Jenjang Pendidikan	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	116,76	98,69	106,97	116,03	111,38	113,74
SMP	77,84	115,27	94,16	82,19	91,98	86,68
SMA	85,01	67,63	77,32	82,66	85,81	83,95
Perguruan Tinggi	5,07	10,72	7,93	11,46	17,18	14,35

Sumber : Susenas 2015, 2016

Tabel 3.5 menunjukkan APK SD/MI tahun 2016 sebesar 113,74 persen. Sedangkan untuk APK tingkat SMP/MTs dan SM/MA masing-masing sebesar 86,68

persen dan 83,95 persen. APK untuk Perguruan Tinggi masih sangat rendah yaitu mencapai sebesar 14,35 persen.

Jika dibandingkan tahun 2015, APK baik untuk SMP/MTs, SM/MA tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan. Namun, APK untuk SMP mengalami penurunan. APK untuk SD/ sederajat turun dari 106,97 persen menjadi 113,74 persen. Sedangkan APK untuk SMA/ sederajat mengalami peningkatan dari 77,32 persen menjadi 83,95 persen. Pada tingkat Perguruan Tinggi, APK meningkat dari 7,93 persen menjadi 14,35 persen. APK pada tingkat SMP/ sederajat turun dari 94,16 persen menjadi 86,68 persen.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan harus terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat cepat diantisipasi dan diselesaikan. Permasalahan tersebut diantaranya tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya, merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan nasional.

Tenaga kerja yang banyak dan melimpah belum merupakan jaminan bahwa daerah tersebut akan makmur. Hal ini disebabkan jika tidak terintegrasinya pengelolaan tenaga kerja yang dimiliki suatu daerah yang tidak memiliki potensi dan tingkat pendidikan. Selain itu, kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Makin lengkap dan akurat data ketenagakerjaan yang tersedia makin jelas dan tepat arah pembangunan yang direncanakan.

4.1 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja

Dalam konsep BPS, usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini dibagi menjadi penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang ikut berpartisipasi dalam lapangan kerja, baik statusnya sudah bekerja maupun yang pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja aktifitasnya adalah yang tidak terkait dengan bekerja secara produktif misalnya sekolah dan mengurus rumah tangga.

Tabel 4.1
Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu
Di Kab. Batang, 2015

Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Angkatan Kerja	378.320	67,62
- Bekerja	361.065	64,53
- Pengangguran	17.255	3,08
Bukan Angkatan Kerja	181.168	32,38
Sekolah	31.683	5,66
Mengurus Rumah Tangga	126.225	22,56
Lainnya	23.260	4,16
PUK	559.488	100,00
TPT		4,56
TPAK		67,62

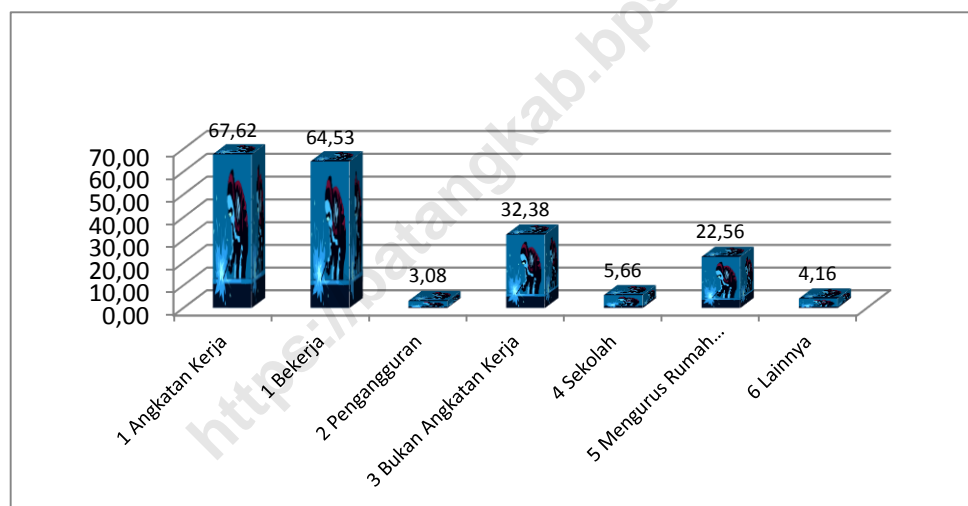
Sumber : Sakernas Agustus 2015

Pada Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa penduduk umur 15 tahun ke atas bulan Agustus 2015 adalah sebanyak 559.488 orang, yang terdiri dari 378.320 orang angkatan kerja, dan 181.168 orang bukan angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan total penduduk umur 15 tahun ke atas, tampak bahwa persentase tertinggi untuk kegiatan seminggu yang lalu adalah untuk penduduk yang bekerja dengan persentase sebesar 64,53 persen, disusul penduduk yang mengurus rumah tangga sebesar 22,56 persen. Dari penduduk yang masuk golongan angkatan kerja, persentase terbesar

adalah untuk penduduk yang bekerja. Untuk penduduk yang masuk golongan bukan angkatan kerja, persentase terbesar adalah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Untuk melihat lebih jelas tentang persentase angkatan kerja yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja, dapat dilihat Gambar 4.1. Penduduk umur 15 tahun ke atas sekitar 67,62 persen yang berpartisipasi aktif dalam lapangan pekerjaan, dan sebesar 4,56 persen pengangguran, sedangkan 32,38 persen bukan angkatan kerja.

Gambar 4.1
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu Di Kab. Batang, 2015



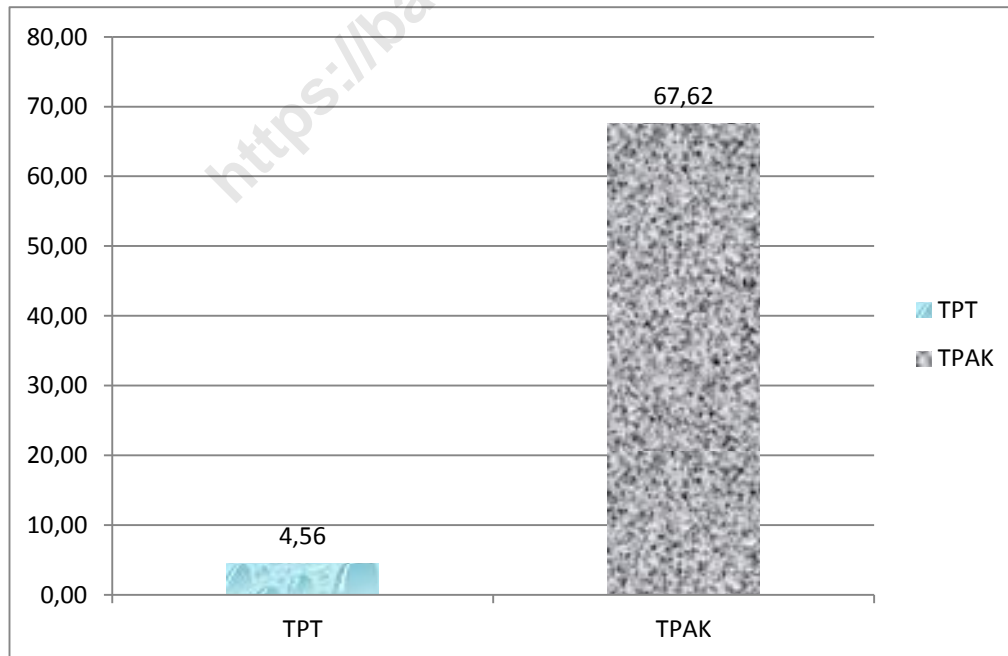
Sumber : Sakernas Agustus 2015

4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 4.2
TPT dan TPAK Di Kab. Batang, 2015

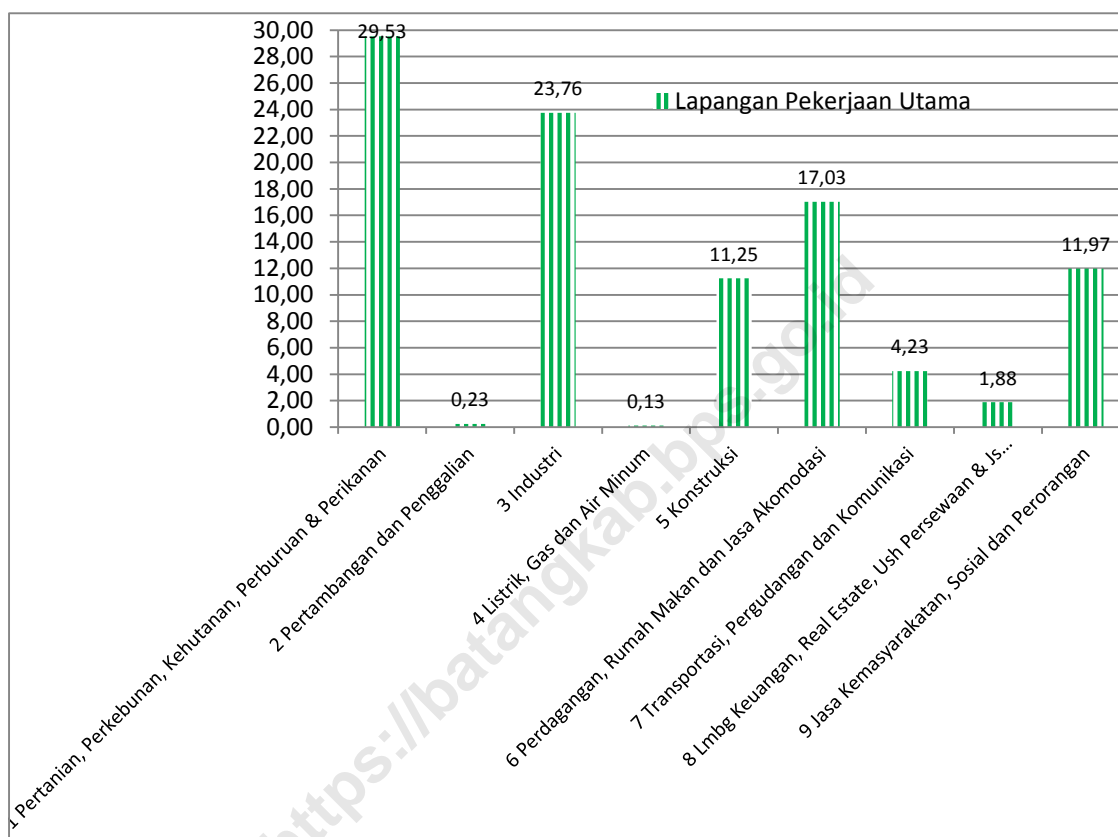


Sumber : Sakernas Agustus 2015

Untuk melihat TPAK dan TPT Jawa Tengah pada tahun 2015, dapat dilihat pada Gambar 4.2. TPAK di Batang mencapai sekitar 67,62 persen, sedangkan TPT mencapai 4,56 persen.

4.3 Lapangan Pekerjaan Utama

Gambar 4.3
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama Selama Seminggu yang Lalu Di Kab. Batang, 2015



Sumber : Sakernas Agustus 2015

Gambar 4.3 menggambarkan persentase masing-masing lapangan usaha utama seminggu yang lalu untuk tahun 2015. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak ditekuni oleh penduduk Batang mencapai 29,53 persen. Lapangan usaha terbanyak berikutnya adalah Industri sebesar 23,76 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebesar 17,03 persen. Sementara untuk lapangan usaha yang lain persentasenya di bawah 12 persen. Untuk Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan sebesar 11,97 persen.

BAB V

PERUMAHAN

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar akan rumah tempat tinggal dengan lingkungan sekitar yang baik dan sehat merupakan kebutuhan yang penting untuk dipenuhi. Rumah dan kelengkapannya selain merupakan kebutuhan dasar, juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat.

Keadaan perumahan adalah salah satu faktor yang menentukan keadaan higienis dan sanitasi lingkungan. Perumahan yang tidak sehat dan terlalu sempit mengakibatkan mudah terjangkitnya penyakit dalam masyarakat. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selain itu, kualitas lingkungan rumah tinggal juga memengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

5.1 Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Luas rumah yang ditempati dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin tinggi status sosial suatu rumah tangga maka semakin luas lantai

yang dikuasai oleh rumah tangga. Oleh karena itu, luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 5.1
Persentase Rata-rata Luas Lantai Di Kab. Batang, 2015-2016

Luas Lantai Hunian	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
< 20	1,18	0,03
20-49	10,86	7,87
50-99	64,58	67,92
≥ 100	23,39	24,18
	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015, 2016

Pada Tabel 5.1 menggambarkan luas lantai rumah (dalam meter persegi) yang ditempati rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi sebesar 7,90 persen, dan yang menempati rumah dengan luas lantai 50-99 meter persegi sebesar 67,92 persen, sedangkan yang menempati rumah dengan luas lantai 100 meter persegi atau lebih hanya sebesar 24,18 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi mengalami perubahan yaitu sebesar 1,15 persen, rumah tangga dengan luas lantai 20-49 meter persegi di tahun 2015 sebesar 10,86 persen turun menjadi 7,87 persen tahun 2016. Rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi di tahun 2015 sebesar 1,18 persen turun menjadi 0,03 persen tahun 2016. Sedangkan rumah tangga dengan luas lantai 50-99 meter persegi meningkat dari 64,58 persen tahun 2015 menjadi sebesar 67,92 persen tahun 2016. Pada rumah tangga yang memiliki luas lantai lebih besar dari 100 meter persegi meningkat yaitu tahun 2015 yaitu sebesar 23,39 persen menjadi sebesar sebesar 24,18 persen tahun 2016.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Semakin banyak rumah tinggal yang memiliki beberapa kualitas mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas perumahan di suatu daerah.

Tabel 5.2
Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab.Batang, 2015-2016

Kualitas Perumahan	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Perkotaan	Perdesaa n	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai Bukan Tanah	82,96	78,42	80,18	90,60	74,27	80,93
Atap Layak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dinding Permanen	99,00	98,99	98,99	99,57	99,53	99,54

Sumber : Susenas 2015, 2016

Secara keseluruhan, kondisi perumahan di Kabupaten Batang relatif memenuhi kriteria rumah sehat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah (80,93 persen), rumah tinggal dengan atap layak (100 persen) dan dinding permanen (99,54 persen). Akan tetapi kualitas perumahan di perdesaan pada umumnya masih relatif lebih rendah dibanding daerah perkotaan. Rumah tangga yang menggunakan lantai bukan tanah di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 90,60 persen dan 74,27 persen. Selain itu rumah tangga yang menggunakan dinding permanen di daerah perdesaan (99,53 persen) sedikit lebih rendah dibandingkan di perkotaan (99,57 persen).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase rumah tangga dengan masing-masing kualitas bahan bangunan yang digunakan mengalami peningkatan. Persentase rumah tangga yang berlantai bukan tanah naik di tahun 2016

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Batang 2016

sebesar 80,93 persen dibanding tahun 2015 sebesar 80,18 persen. Rumah tangga dengan atap layak di tahun 2015 dan tahun 2016 mencapai 100 persen. Sementara rumah tangga dengan dinding permanen meningkat dari 98,99 persen tahun 2015 menjadi sebesar 99,54 persen tahun 2016.

5.2 Penguasaan Tempat Tinggal

Status penguasaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

Tabel 5.3
Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Penguasaan Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016

Status Kepemilikan Rumah	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik sendiri	93,79	97,08	95,81	96,71	97,01	96,89
Kontrak/sewa	1,41	0,15	0,64	0,85	0,55	0,67
Bebas sewa	4,28	2,38	3,12	2,45	2,33	2,38
Dinas	0,52	0,39	0,44	0,00	0,10	0,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2015, 2016

Seperti pada Tabel 5.3, persentase rumah tangga di Kabupaten Batang tahun 2016 yang menempati rumah sendiri sebesar 96,89 persen, dan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 0,67 persen, sedangkan yang menempati rumah dinas/bebas sewa/lainnya sebesar 2,38 persen. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri lebih tinggi di perdesaan (97,01 persen) dibanding persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri di perkotaan (96,71 persen). Sementara persentase rumah tangga yang menempati rumah kontrak/sewa lebih

banyak di perkotaan (0,85 persen) dibanding persentase rumah tangga yang menempati rumah kontrak/sewa di perdesaan (0,55 persen). Hal ini disebabkan berkurangnya lahan kosong dan tingginya harga jual rumah di perkotaan sehingga lebih mudah bagi rumah tangga di perkotaan untuk sewa/kontrak daripada membuat rumah baru.

Dibanding tahun sebelumnya, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri mengalami peningkatan, yaitu dari 95,81 persen menjadi 96,89 persen. Persentase rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa mengalami peningkatan yaitu dari 0,64 persen menjadi 0,67 persen. Rumah tangga yang tinggal di rumah dinas atau bebas sewa juga mengalami penurunan yaitu dari 0,44 persen menjadi 0,06 persen.

5.3 Fasilitas Perumahan

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga tersebut juga menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 5.4
Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2015-2016

Fasilitas Perumahan	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penerangan Listrik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Air Minum Kemasan/Leding	22,69	10,54	15,25	43,88	12,40	25,24
Jamban sendiri denagnTangkiseptik	66,56	43,27	52,30	81,37	50,13	64,40

Sumber : Susenas 2015, 2016

Penggunaan fasilitas perumahan seperti penerangan listrik dan air bersih sudah relatif banyak dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan data Susenas 2016, ada 100 persen rumah tangga di Kabupaten Batang yang memiliki fasilitas penerangan listrik, 25,24 persen rumah tangga yang telah memiliki fasilitas air minum kemasan/leding, dan 22,14 persen memiliki jamban sendiri dengan tangki septik.

Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Penggunaan fasilitas penerangan listrik untuk daerah perkotaan dan perdesaan sudah banyak dimanfaatkan, yaitu sebesar 100 persen.

Program penyediaan air bersih terus menerus diupayakan pemerintah. Penggunaan air minum kemasan/leding, masih banyak dimanfaatkan di daerah perkotaan sebesar 43,88 persen dan di daerah perdesaan hanya sebesar 12,40 persen.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Disamping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Penggunaan jamban sendiri dengan tangki septik masih banyak digunakan di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan yaitu masing-masing sebesar 81,73 persen dan 50,13 persen.

5.4 Penguasaan Alat Komunikasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi, kepemilikan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi telepon selular membuat telepon rumah semakin ditinggalkan.

Tabel 5.5
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Seluler, Telepon Rumah (PSTN) dan Komputer menurut Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang, 2016

Alat Komunikasi	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon Seluler	62,21	50,74	55,48
Telepon Rumah (PSTN)	3,58	0,00	1,46
Komputer/laptop	20,27	9,71	14,02

Sumber : Susenas 2016

Berdasarkan Tabel 5.5, Sekitar 55,48 persen rumah tangga yang mempunyai telepon seluler aktif, kemudian 1,46 persen rumahtangga yang mempunyai telepon rumah (PSTN) dan 14,02 persen memiliki computer/laptop. Kepemilikan computer/laptop bagi rumah tangga di perkotaan juga lebih besar jika dibandingkan dengan di perdesaan masing-masing sebesar 20,27 persen dan 9,71 persen.

BAB VI

PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan penduduk.

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Data pengeluaran (dalam rupiah) menurut kelompok makanan dan bukan makanan dapat digunakan untuk mengetahui pola pengeluaran penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama. Pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 6.1
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (dalam Rupiah) menurut Jenis
Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal Batang, 2016

Pengeluaran	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	Rp 376.886	Rp 312.772	Rp 339.466
	53,16 %	54,42 %	53,83 %
Non Makanan	Rp 332.113	Rp 261.939	Rp 291.156
	46,84 %	45,58 %	46,17 %
Jumlah	Rp 708.999	Rp 574.711	Rp 630.622
	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016

Berdasarkan Tabel 6.1 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Batang sebesar 630.622 rupiah. Sebesar 339.466 rupiah atau 53,83 persen dari pengeluaran digunakan untuk kebutuhan makanan dan sisanya sebesar 291.156 rupiah atau 46,17 persen digunakan untuk kebutuhan bukan makanan.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, rata-rata pengeluaran makanan per kapita di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Persentase pengeluaran penduduk di perkotaan cenderung sudah beralih ke kebutuhan sekunder/tersier (bukan makanan). Persentase untuk makanan sebesar 53,16 persen lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan dengan persentase sebesar 54,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan tingkat kesejahteraan penduduk di perdesaan.

Tabel 6.2
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (dalam Rupiah)
menurut Kelompok Komoditas Di Kab. Batang, 2015

Kelompok Komoditas	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	51.625	54.748	53.477
2. Umbi-Umbian	1.647	1.969	1.838
3. Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	16.930	12.910	14.545
4. Daging	13.526	7.882	10.178
5. Telur dan Susu	20.010	16.501	17.928
6. Sayur-sayuran	18.550	21.198	20.121
7. Kacang-kacangan	12.361	12.636	12.524
8. Buah-Buahan	16.563	19.994	18.598
9. Minyak dan Lemak	8.684	10.318	9.653
10. Bahan Minuman	10.635	12.655	11.833
11. Bumbu-Bumbuan	7.187	8.130	7.746
12. Konsumsi Lainnya	6.566	6.428	6.484
13. Makanan dan Minuman Jadi	95.698	83.103	88.227
14. Tembakau dan Sirih	38.789	44.254	42.031
Jumlah Makanan	318.769	312.725	315.184
15. Pengeluaran rumah tangga perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	140.955	120.675	128.925
16. Pengeluaran rumah tangga Aneka Barang dan Jasa	70.928	54.884	61.410
17. Pengeluaran rumah tangga Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	21.279	19.187	20.038
18. Pengeluaran rumah tangga Barang Tahan Lama	52.488	29.173	38.658
19. Pengeluaran rumah tangga Pajak, Pungutan dan Asuransi	12.053	8.596	1 002
20. Pengeluaran rumah tangga Keperluan pesta dan Upacara/Kenduri	6.671	6.541	6.594
Jumlah Bukan makanan	304.373	239.055	265.626
Jumlah	623.142	551.779	580.810

Sumber : Susenas 2015

Tabel 6.2 menunjukkan peningkatan terjadi di sebagian kelompok komoditas baik pada kelompok makanan maupun bukan makanan. Pada kelompok bukan makanan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan tahun 2015 di perkotaan yaitu sebesar Rp. 304.373 dan di perdesaan Rp. 239.055 dibanding tahun 2014. Pada kelompok makanan pengeluaran perkapita penduduk di perdesaan Rp. 312.725 dan perkotaan Rp. 318.769.

6.2 Konsumsi per Kapita Beberapa Kelompok Komoditas

Konsumsi rata-rata per kapita untuk kelompok komoditas bahan makanan penting dapat dilihat pada Tabel 6.3. Dalam tahun 2015 konsumsi rata-rata per kapita di beberapa kelompok komoditas bahan makanan dan minuman mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap besarnya rata-rata konsumsi perkapita penduduk perkotaan. Konsumsi makanan terbesar terjadi pada kelompok komoditas makanan dan minuman yaitu sebesar 15,19 persen. Konsumsi makanan pada kelompok komoditas umbi-umbian yaitu sebesar 0,32 persen menempati proporsi terkecil.

Rata-rata pengeluaran konsumsi bukan makanan terbesar pada kelompok komoditas perumahan dan fasilitas perumahan rumahtangga yaitu sebesar 22,2 persen kemudian diikuti kelompok komoditas barang dan jasa 10,57 persen, barang tahan lama 6,66 persen, sedangkan rata-rata pengeluaran kelompok komoditas pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pajak pungutan dan asuransi, keperluan pesta dan upacara/kenduri masih dibawah 4 persen.

Tabel 6.3
Konsumsi Rata-rata per Kapita Seminggu Menurut Kelompok Komoditas
Di Kab. Batang, 2015

Kelompok Komoditas (1)	Rata-rata Konsumsi	
	Per Kapita (2)	% (3)
1. Padi-Padian	53.477	9,21
2. Umbi-Umbian	1.838	0,32
3. Ikan	14.545	2,50
4. Daging	10.178	1,75
5. Telur dan Susu	17.928	3,09
6. Sayur-sayuran	20.121	3,46
7. Kacang-Kacangan	12.524	2,16
8. Buah-Buahan	18.598	3,20
9. Minyak dan Lemak	9.653	1,66
10. Bahan Minuman	11.833	2,04
11. Bumbu-Bumbuan	7.746	1,33
12. Konsumsi Lainnya	6.484	1,12
13. Makanan dan Minuman Jadi	88.227	15,19
14. Tembakau dan Sirih	42.031	7,24
Jumlah Makanan	315.184	54,27
15. Perumahan dan Fasilitas Rumahtangga	128.925	22,20
16. Barang dan Jasa	61.410	10,57
17. Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	20.038	3,45
18. Barang-barang yang Tahan Lama	38.658	6,66
19. Pajak, Pungutan dan Asuransi	1 002	1,72
20. Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	6.594	1,14
Jumlah Makanan	265.626	45,73
Jumlah Makanan+Bukan Makanan	580.810	100

Sumber : Susenas 2015

6.3 Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk yang dihitung berdasarkan banyaknya kalori dan protein yang dikonsumsi. Angka kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari dihitung berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X (2012). Angka kecukupan kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 6.4
Rata-rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) per Kapita Sehari menurut
Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang dan Jawa
Tengah, 2016

Kabupaten/Jawa Tengah	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Batang	2.144,18	1.988,59	2.053,37
Jawa Tengah	1.932,45	1.939,50	1.936,26

Sumber : Susenas 2016

Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari di Jawa Tengah tahun 2015 adalah 1.936,26 kkal dan konsumsi protein per kapita sehari 53,76 gram. Sedangkan Berdasarkan batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita sehari, maka rata-rata konsumsi kalori penduduk Batang Tahun 2015 di atas angka kecukupan konsumsi kalori Jawa Tengah yaitu sebesar 1990,91 kkal, demikian juga dengan rata-rata konsumsi protein Kab. Batang (59,02 gram) di atas rata-rata konsumsi protein Jawa Tengah (53,76 gram).

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pengeluaran rata-rata konsumsi kalori di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan yaitu masing-masing 2.080,22 kkal dan 1.929,66 kkal. Kontribusi pengeluaran rata-rata konsumsi kalori di daerah perdesaan lebih rendah bila dibandingkan rata-rata konsumsi kalori di daerah perkotaan pada kelompok makanan karena konsumsi kelompok makanan terutama pada kelompok komoditas nakanan dan minuman jadi, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telura dan susu, cukup besar sehingga rata-rata konsumsi kalori di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan.

Sementara pengeluaran rata-rata konsumsi di perdesaan pada kelompok komoditas padi-padian, tembakau dan sirih dan sayur-sayuran yang mempunyai kontribusi besar terhadap proporsi pengeluaran rata-rata per kapita.

Rata-rata konsumsi protein di perkotaan dan di perdesaan sudah memenuhi standar kecukupan konsumsi protein per kapita sehari yaitu sebesar 63,34 gram untuk di perkotaan dan di perdesaan mencapai 56,06 gram.

Tabel 6.5

Rata-Rata Konsumsi Protein (Gram) menurut Daerah dan Daerah Tempat Tinggal Di Kab. Batang dan Jawa Tengah, 2016

Kabupaten/Jawa Tengah	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Batang	67,32	56,70	61,12
Jawa Tengah	55,68	52,13	53,76

Sumber : Susenas 2016

Pola konsumsi penduduk di suatu daerah dapat ditentukan oleh daerah tempat tinggal, adat/budaya dan kebiasaan masyarakatnya. Perbedaan pola konsumsi antar daerah dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi pangan yang beragam antar daerah. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota adalah dengan membandingkan proporsi pengeluaran untuk makanan dari total pengeluaran antar kabupaten/kota tersebut. Makin tinggi proporsi tersebut maka makin rendah tingkat kesejahteraan penduduknya.

D A T A
MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation

<https://batangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG**

Jalan Pemuda No. 9 Batang 51216
Telp/Fax (0285) 391004

Homepage: <https://batangkab.bps.go.id> Email: bps3325@bps.go.id